

**KAJIAN KOTA KOTAMOBAGU MENUJU KOTA LAYAK HUNI
(LIVABLE CITY)**

Andi Makalalag¹, Pierre H. Gosal², & Poli Hanny³

¹Mahasiswa SI Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado
^{2&3} Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Sebuah kota yang baik haruslah memberikan kenyamanan bagi penduduk yang tinggal didalamnya. Konsep kota yang nyaman untuk ditinggali ini dikenal dengan konsep *Livable City*. Peningkatan penduduk yang bermukim di kota Kotamobagu tentu akan semakin menambah kebutuhan akan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Berbagai macam aktivitas penduduk juga akan memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan hidup. Hal ini berlaku pada lingkungan fisik, biotik, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga tidak efisiennya tata kelola perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kota Kotamobagu sebagai kota layak huni (*Livable City*) berdasarkan kriteria Ikatan Ahli Perencana (IAP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan analisis kuantitatif. Metode pengambilan data adalah observasi, wawancara, kuesioner dan jumlah populasi 2.673 sebagai sampel penelitian. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada 25 kriteria pokok. 15 kriteria memiliki kesesuaian yang kurang mendukung kondisi kota layak huni, 10 kriteria memiliki kesesuaian dengan konsep *Livable City*, sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini mendukung kota layak huni yaitu : informasi pelayanan publik, interaksi antar hubungan penduduk, tingkat kriminalitas, kualitas jaringan telekomunikasi, kualitas fasilitas air bersih, kualitas fasilitas pendidikan, kondisi jalan, ketersediaan angkutan umum, kualitas kebersihan lingkungan dan jumlah ruang terbuka.

Kata Kunci : *Livable City*, IAP, Kriteria, Kotamobagu

Pendahuluan

Sebuah kota yang baik haruslah memberikan kenyamanan bagi penduduk yang tinggal di dalamnya. Konsep kota yang nyaman untuk ditinggali ini dikenal dengan konsep *Livable City*. *Livable City* merupakan sebuah definisi yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas, transportasi, prasarana dan sarana) maupun aspek nonfisik (sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan). Iklim dan cuaca setempat memiliki pengaruh terhadap tingkat kenyamanan penduduk suatu Kota. Gosal,dkk (2012) menjelaskan bahwa sebagian besar kota di Indonesia dirancang tanpa mempengaruhi aspek suhu dan kelembaban sehingga manusia yang tinggal dalam rumah di kota-kota tersebut merasa tidak nyaman untuk

melakukan aktifitas kesehariannya.

Dalam rangka mengetahui tingkat kenyamanan kota-kota besar di Indonesia maka Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) yang merupakan asosiasi profesi bagi perencana kota dan wilayah melakukan penelitian Indonesia Most *Livable City* Index 2009, dengan penelitian yang meliputi 25 kriteria yang telah di tetapkan. dan baru dilakukan pada beberapa kota di Indonesia. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IAP diketahui bahwa pada tahun 2009, hanya terdapat 54,17% penduduk di Indonesia yang merasa nyaman tinggal di kota tempat tinggal mereka.

Kota Kotamobagu merupakan wilayah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No 4 Tahun 2007 pada Tanggal 2 Januari 2007. Kota Kotamobagu merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Kotamobagu.

Peningkatan penduduk yang bermukim di kota Kotamobagu tentu akan semakin menambah kebutuhan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.

Berbagai macam aktivitas penduduk selain itu juga akan memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan hidup, baik itu lingkungan fisik, biotik, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan juga mempengaruhi menjadi tidak efisiennya tata kelola perkotaan.

Hal tersebut kemudian akan mempengaruhi kelayakan Kota Kotamobagu untuk dihuni. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk, Menilai dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang "KAJIAN KOTA KOTAMOBAGU MENUJU KOTA LAYAK HUNI". Pentingnya makna kota layak huni (*Livable City*) bagi manusia karena merupakan pelayanan yang mendasar dari pemerintah kota yang harus diberikan untuk sebuah kota, maka perlu ditinjau sejauh mana kriteria yang disebutkan diatas

LANDASAN TEORI

Pengertian Kota

Pengertian kota menurut (Bintarto, 1987 : 4) kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Dalam perkembangannya, konsep kota paling tidak dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu segi fisik, administratif, sosial dan fungsional, Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk kenampakan fisik dari lingkungan kota *Livable City*

Livable City merupakan istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan

dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat untuk beraktivitas yang di lihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasalitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Menurut D. Hahlweg, 1997. "*The City as a Family*" sebuah kota layak huni adalah sebuah kota di mana warga kota bisa memiliki kehidupan yang sehat dan memiliki kesempatan untuk mudah beraktifitas dengan berjalan kaki, sepeda, angkutan umum, dan bahkan dengan mobil jika tidak ada pilihan lain-kota layak huni adalah kota bagi semua orang.

Konsep kota layak huni ini dapat ditarik pengertian bahwa konsep ini menggambarkan proses kehidupan menuju kesejahteraan dan kenyamanan warga kota demi berlangsungnya perkembangan kota. Proses yang terjadi ini terhubung antara kegiatan kehidupan kota dan daya masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kota.

Prinsip *Livable City*

Dalam mewujudkan kota yang layak huni atau *Livable City* harus mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar ini harus dimiliki oleh kota-kota yang ingin menjadikan kotanya sebagai kota layak huni dan nyaman bagi masyarakat kota. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan *Livable City*: (1). Menurut Dougass (2002 : 166), dalam *Livable City* dapat dikatakan bertumpu pada 4 (empat) pilar, yaitu: Meningkatkan sistim kesempatan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, lingkungan yang aman dan bersih untuk kesehatan, kesejahteraan dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, *Good governance*. (2). Menurut Lennart (1997 : 132). Prinsip dasar untuk *Livable City* adalah: Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik), Tersedianya berbagai fasilitas umum

dan fasilitas sosial (Transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan), Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan bebas dari rasa takut, Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik. (3) Prasetyo dan Muttaqin (2009 : 28) menjelaskan bahwa terdapat 25 kriteria kota layak huni yang dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) yang berpedoman pada variabel utama perkotaan berupa fisik kota, kualitas lingkungan, transportasi-aksesibilitas, fasilitas, utilitas, ekonomi, dan sosial. Kedua puluh lima kriteria tersebut antara lain: Kualitas penataan kota, jumlah ruang terbuka, perlindungan bangunan bersejarah, kualitas kebersihan lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, ketersediaan angkutan umum, kualitas angkutan umum, kualitas kondisi jalan, kualitas fasilitas pejalan kaki, ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas fasilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas rekreasi, kualitas fasilitas rekreasi, ketersediaan energi listrik, ketersediaan air bersih, Kualitas air bersih, kualitas jaringan telekomunikasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat aksesibilitas tempat kerja, tingkat kriminalitas, Interaksi hubungan antar penduduk, informasi pelayanan publik, ketersediaan fasilitas kaum *diffable*.

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitiannya dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu "Kajian Kota Kotamobagu Menuju Kota Layak Huni berdasarkan Kriteria IAP (Ikatan Ahli Perencanaan). Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode

deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data statistik yang diperoleh dari responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Penelitian untuk memperoleh data primer yang meliputi:
 - b. Pengamatan (Observasi) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.
 - c. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti
 - d. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penulis membuat pertanyaan yang mengacu pada indikator masing-masing variabel. Dalam hal ini kuesioner disebarkan kepada 96 responden yaitu PNS/instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari kuesioner tentang kualitas pelayanan, kuesioner kepuasan pelanggan. Dalam pemberian skor/nilai terhadap jawaban pertanyaan pada kuesioner menggunakan skala Likert (Sugiono, 2001:33). Kategori jawaban pada tiap-tiap pertanyaan dalam kuesioner sebagai berikut :
 - Sangat Setuju = skor 5
 - Setuju = skor 4
 - Kurang Setuju = skor 3
 - Tidak Setuju = skor 2
 - Sangat Tidak Setuju = skor 1
2. Penelitian untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis

kepuustakaan.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang mempunyai syarat menjadi sampel (Hidayat, 2007). kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat di kota Kotamobagu yang bersedia menjadi responden
- b. Masyarakat di kota Kotamobagu dalam hal ini di wakili oleh PNS/instansi-instansi yang terkait.

Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = presisi yang di tetapkan (0,10) atau 10%

Pengambilan sampel berdasarakan jumlah PNS yang ada di istansi-instansi yaitu 2736.

$$n = \frac{N}{1 + N(x)^2}$$

$$n = \frac{2.736}{1 + 2.736(0,10)^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.736}{1+2.737,01} = \frac{2.736}{28,36}$$

$$n = 96,47 \quad n = 96$$

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96,47 di bulatkan menjadi 96 sampel yang akan di bagikan pada PNS/instansi-instansi yang terkait di kota Kotamobagu.

Teknik analisis data yang dilakukan berasal dari hasil angket yang telah diisi oleh responden yang berjumlah 96 orang masyarakat kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan memadukan dengan teknik kuantitatif. untuk menghitung frekuensi mengenai hasil dari pembagian kuesioner diolah menggunakan perangkat lunak berupa *Microsoft Excel* untuk mengetahui frekuensi dan persentasenya. Kemudian hasil

penelitian akan di analisis menggunakan analisis statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan wilayah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No 4 Tahun 2007. Pada Tanggal 2 Januari 2007. Kotamobagu merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibukota Kotamobagu.

Secara administrasi kota Kotamobagu terbagi ke dalam 4 wilayah kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kotamobagu memiliki luas wilayah sebesar 68,09 km²



Gambar 1 Peta Administrasi Kota Kotamobagu

Sumber : Penulis 2018

Analisis 25 kriteria Kota Kotamobagu Menuju Kota Layak Huni (*Livable City*) secara rinci diuraikan sebagai berikut.

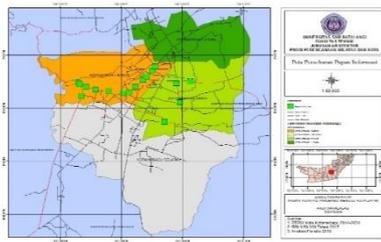
1. Informasi Pelayanan Publik

Untuk Informasi Pelayanan Publik di kota Kotamobagu penulis melakukan analisis terhadap penyebaran *Sign System* (tanda) di ruang publik kota. Adapun informasi pelayanan publik yang dianalisis adalah papan reklame, papan penunjuk arah, dan papan informasi.



Gambar 2 Peta Persebaran Papan Reklame

Sumber : Penulis 2018

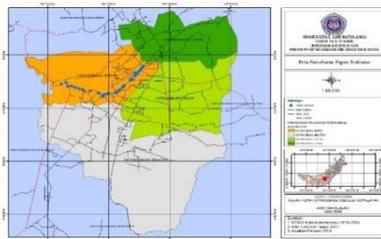


Gambar 3 Peta Persebaran Papan Petunjuk arah

Sumber : Penulis 2018

Gambar 4 Peta Persebaran Papan Informasi

Sumber : Penulis 2018



Berdasarkan hasil kuesioner nilai jawaban tertinggi adalah 55% yang menjawab setuju dan 23% menjawab sangat setuju, Hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria informasi pelayanan publik sudah baik karena dinilai berfungsi dengan baik dan berperan penting bagi publik.

2. Interaksi Antar Hubungan Penduduk

Dalam interaksi antar hubungan penduduk penulis menganalisis terhadap Kerukunan antar umat beragama dilakukan untuk mengungkap hal pemeliharaan kedamaian oleh masyarakat kota Kotamobagu kedepannya

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui nilai presentase tertinggi sebesar 64% yang menjawab sangat setuju dan 32% menjawab setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria interaksi antar hubungan penduduk sudah baik karena kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik.

3. Tingkat Kriminalitas

Dalam analisis tingkat

kriminalitas ini difokuskan pada kasus pembunuhan dan kasus pencurian. berikut hasil analisis dari 2 tingkat kriminalitas di kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui nilai persentase tertinggi adalah sebesar 53% yang menjawab setuju dan 23% yang menjawab kurang setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap tingkat kriminalitas di kota Kotamobagu masih tergolong rendah.

4. Tingkat Aksesibilitas Tempat Kerja

Analisis ini difokuskan pada zona asal (zona pembangkit) ke zona tujuan (zona penarik) begitu pula sebaliknya. Pola perjalanan transportasi/angkutan umum di kota Kotamobagu tidak menggunakan basis dan rute perjalanan yang diatur oleh pemerintah kota, sehingga angkutan umum yang ada bebas mengakses semua jalan yang ada. Hal ini menjadikan pola pergerakan angkutan umum tidak teratur dan merata disetiap kecamatan, sehingga untuk melihat tingkat aksesibilitas tempat kerja di kota Kotamobagu dilihat dari zona penarik tujuan aksesibilitas tempat kerja menyesuaikan dengan keadaan fasilitas umum di tiap-tiap wilayah, seperti, pusat pertokoan, pusat perkantoran, pusat pendidikan, lokasi industri dan pariwisata.

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui nilai presentase tertinggi adalah 41% yang menjawab tidak setuju dan 28% kurang setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria tingkat aksesibilitas tempat kerja di kota Kotamobagu kurang memudahkan aktivitas para penduduk yang berdampak pada tingkat aksesibilitas.

5. Kualitas Jaringan Telekomunikasi

Analisis ini dilakukan dengan mengetahui kualitas jaringan telekomunikasi dalam hal ini jumlah dan jenis tower seperti tower Seluler, tower Radio, dan tower TV.

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui nilai presentase tertinggi sebesar 67% yang menjawab setuju dan 20 % menjawab kurang setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kualitas jaringan telekomunikasi sudah baik karena memiliki BTS (Base Telekomunikasi Sistem) yang merata

6. Kualitas Air Bersih

Untuk penelitian kualitas air bersih dilakukan dengan menganalisis kualitas air sungai Dayanan dan Yantaton

Berdasarkan Hasil kuesioner nilai persentase tertinggi adalah 54% yang menjawab setuju dan 30% menjawab kurang setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kualitas air di kota Kotamobagu masih tergolong baik. Karena masih tergolong pada pencemaran tingkat 2.

7. Ketersediaan Air Bersih

Di kota Kotamobagu secara umum ada 2 pelayanan air minum yaitu, PT.Air dan PDAM. Menurut sumber dari PDAM kota Kotamobagu, sistem pengolahan air menggunakan metode distribusi dan jaringan perpipaan, atau disebut dengan sistem gravitasi. bahwa capaian cakupan air bersih di kota Kotamobagu tahun 2017 adalah 54% dengan total jumlah sambungan penduduk 16.553 unit. Hal ini belum mencapai sasaran target dari MDGS tahun 2017 bahwa standar cakupan pelayanan air bersih di perkotaan sebesar 68,82%.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi adalah 54% yang menjawab kurang setuju dan 30% menjawab setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria ketersediaan fasilitas air bersih di kota Kotamobagu belum terpenuhi. Karena belum mencapai sasaran target dari MDGS bahwa standar cakupan pelayanan air bersih di perkotaan sebesar 68,82%.

8. Kualitas Fasilitas Pendidikan

Analisis kualitas fasilitas pendidikan di kota Kotamobagu dilakukan dengan mengetahui jumlah sekolah, gedung, dan guru. dapat dilihat banyaknya sekolah, gedung, dan guru di kota Kotamobagu dengan jumlah sekolah 98, gedung 98, dan guru 1357.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi sebesar 55% yang menjawab setuju dan 27% menjawab kurang setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kualitas fasilitas pendidikan sudah baik.

9. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Analisis ketersediaan fasilitas pendidikan dilakukan dengan mengetahui jumlah fasilitas pendidikan, seperti SD, SLTP, SMA, dan Perguruan Tinggi

Tabel 1 Banyaknya Jumlah SD,SLTP,SMA dan Perguruan Tinggi

KECAMATAN	SD	SM P	SMA	PERGURUAN TINGGI	JLH
Kota mobagu Selatan	18	4	1		25
Kota mobagu Timur	19	5		1	25
Kota mobagu Barat	20	7	7	3	37
Kota mobagu Utara	12	2	1	1	16
JLH	69	18	11	5	103

Sumber : BPS Kota Kotamobagu 2017

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi sebesar 57% yang menjawab kurang setuju dan 26% yang menjawab setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap ketersediaan fasilitas pendidikan belum baik. Karena untuk penyebaran fasilitas pendidikan yang belum merata untuk tiap kecamatan.

10.Ketersedian Fasilitas Kesehatan

ketersediaan faasilitas kesehatan dilakukan dengan mengetahui banyaknya jumlah rumah sakit dan puskesmas



Gambar. 4 Peta Sebaran Fasilitas Rumah Sakit
Sumber : Penulis 2018

Tabel 2 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kotamobagu

KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	JLH
Kotamobagu Selatan	1	2	3
Kotamobagu Timur	1	2	3
Kotamobagu Barat	1	2	2
Kotamobagu Utara	2	1	3
JUMLAH	5	7	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu 2018

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui nilai persentase tertinggi sebesar 41% kurang setuju dan 34% tidak setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria ketersediaan fasilitas kesehatan belum merata seperti rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek.

11. Kualitas Fasilitas Kesehatan

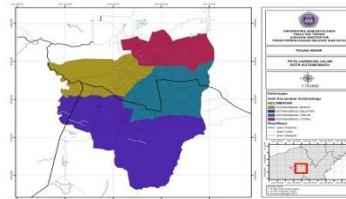
Sekalipun berbagai hasil yang telah dicapai oleh kota Kotamobagu dalam bidang kesehatan, namun dalam pelaksanaannya penanganan kesehatan perlu untuk diperhatikan terlebih peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi adalah sebesar 39% yang menjawab kurang setuju dan 27% menjawab setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kualitas fasilitas kesehatan belum baik karena masih banyak peningkatan penyakit menular, dan pelayanan kesehatan belum merata.

12. Kondisi Jalan

Kondisi jalan dibagi ke dalam 4 kategori jalan, yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Presentase panjang jalan kota menurut kondisi jalan baik 69.53%, sedang 14,89%, rusak

ringan 13.35%, dan rusak berat 2,23%.



Berdasarkan hasil Kuesioner nilai persentase tertinggi adalah sebesar 71% yang menjawab setuju dan 16% menjawab sangat setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kondisi jalan sudah baik dan terawat sehingga memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar hubungan transportasi

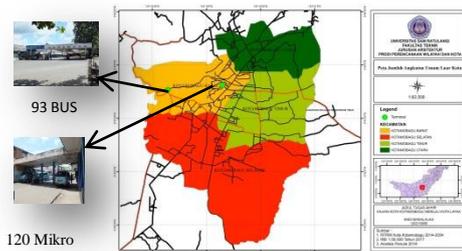
13. Kualitas Angkutan Umum

kualitas angkutan umum dilakukan dengan mengetahui kondisi angkutan umum dan informasi jelas tentang trayek. angkutan umum dalam kota adalah bentor, dan tidak memiliki trayek. keberadaan bentor dibidang transportasi yakni, bentor tidak memenuhi standar transportasi perkotaan.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi adalah 57% yang menjawab kurang setuju, dan 29% menjawab tidak setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kualitas angkutan umum kurang baik karena belum memiliki trayek dan rute perjalanan yang jelas

14. Ketersediaan Angkutan Umum

Ketersediaan angkutan umum dilakukan dengan mengetahui jumlah angkutan umum dalam kota dan luar kota di setiap terminal atau basis. angkutan umum dalam kota yaitu bentor kurang lebih 1000 kendaraan yang tercatat di DISHUB kota dan angkutan umum luar kota yaitu bis dan mikro dengan jumlah 213 yang tercatat di DISHUB

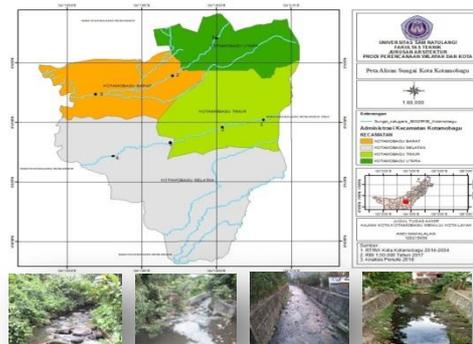


Gambar 6 Peta Jumlah Angkutan Umum Luar Kota
Sumber : Penulis 2018

Berdasarkan hasil Kuesioner nilai persentase tertinggi adalah 65% yang menjawab setuju dan 23% menjawab kurang setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria ketersediaan angkutan umum sebagian besar sudah terpenuhi karena setiap terminal tersedia untuk angkutan umum.

15. Tingkat Pencemaran Lingkungan

Analisis tingkat pencemaran lingkungan dilakukan dengan mengetahui kondisi sungai.



Gambar 7 Peta Kondisi Sungai
Sumber : Penulis 2018

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi adalah 50% yang menjawab kurang setuju dan 22% menjawab setuju, ha ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria tingkat pencemaran lingkungan masih cukup tinggi karena kondisi sungai yang tercemar.

16. Kualitas Kebersihan Lingkungan

Analisis kebersihan lingkungan dilakukan dengan mengetahui penanganan sampah. Data informasi pengolahan sampah kota Kotamobagu dengan Luas Wilayah 68,09 (km²) memiliki Jumlah Penduduk 121.699

jiwa Jumlah timbunan sampah harian wilayah kota otonom 62,06 ton dan jumlah sampah harian ditimbun di TPA 42,39 ton, sampai sekarang volume sampah yang tertangani 97 % dari total timbunan sampah perkotaan. Pengangkutan sampah dilakukan dari transfer depo dan wadah komunal ke TPA dan pengumpulan langsung dari sumber-sumber sampah besar di bawa langsung ke TPA.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi adalah 63% yang menjawab setuju dan 22% menjawab kurang setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kualitas kebersihan lingkungan di kota Kotamobagu seperti penanganan sampah sudah cukup baik, dengan penanganan sampah sampai sekarang yang tertangani adalah 97 % dari total timbunan sampah perkotaan yang ad.

17. Jumlah Ruang Terbuka

Jumlah ruang terbuka ini dilakukan untuk mengetahui jumlah ketersediaan ruang terbuka. hasil analisis tentang Jumlah Ruang Terbuka di kota Kotamobagu adalah lahan RTH 4664 hektar atau 67,92% dari luas wilayah kota 68,02km². Dimana RTH Publik seluas 2673 Ha atau 38,35% dan RTH Private seluas 1990,7 Ha atau 29,22%, jadi untuk saat ini luas RTH masih melampaui yang di dibutuhkan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai presentase tertingi 65% yang menjawab setuju dan 22% menjawab sangat setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria jumlah ruang terbuka, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah memenuhi standar 30%.

18. Perlindungan Kawasan Bersejarah

Perlindungan bangunan bersejarah dilakukan untuk mengetahui jumlah ketersediaan gedung bersejarah yang masih ada dan bangunan bersejarah yang

sudah berpindah fungsi. Di Kotamobagu belum terdapat pembongkaran atau pengalihan fungsi bangunan bersejarah seperti di kota lainnya. Namun tidak menuntut kemungkinan tidak terjadinya pembongkaran atau alih fungsi bangunan bersejarah yang ada.

Kelemahan yang ada di kota Kotamobagu bahwa belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Wali kota Kotamobagu yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap cagar budaya atau larangan mengganggu /merusak situs peninggalan sejarah.

Berdasarkan hasil kuesioner persentase tertinggi 50% yang menjawab kurang setuju dan 24% menjawab tidak setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria perlindungan bangunan bersejarah di kota Kotamobagu sepetinya tidak ad perawatan dan perlindungan untuk bangunan bersejarah.

19. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi

Ketersediaan fasilitas rekreasi dilakukan untuk mengetahui jumlah ketersediaan rekreasi alam dan buatan. Rekreasi alam dan buatan yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kotamobagu yaitu rekreasi alam 5, dan rekreasi buatan 3.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentasi tertinggi 49% yang menjawab tidak setuju dan 31% menjawab tidak setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria ketersediaan fasilitas rekreasi masih kurang baik, karena belum semuanya di kelolah dengan baik.

20. Kualitas Fasilitas Rekreasi

Kualitas fasilitas rekreasi dilakukan dengan mengetahui jumlah fasilitas rekreasi yang tersedia dan kondisi fasilitas rekreasi. Kondisi sampai dengan saat ini, rekreasi alam yang di kelolah dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Kotamobagu yaitu air terjun

Molimpungan yang terdapat di kecamatan Kotamobagu Timur desa Motoboy Kecil. Untuk kondisi fasilitas rekreasi alam yang ada rata-rata fasilitas umum belum memadai, kondisi yang ada semuahnya masih dalam keadan alami. Untuk kualitas fasilitas rekreasi buatan masih memerlukan fasilitas umum yang di perlukan seperti ketersediaan tempat parkir dan tempat sampah.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentasi tertinggi 57% yang menjawab kurang setuju dan 16 % menjawab tidak setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa presepsi responden terhadap kriteria kualitas fasilitas rekreasi masih kurang baik, dan masih banyak memerlukan fasilitas umum seperti tempat sampah, lahan parkir dan WC umum.

21. Ketersediaan Energi Listrik

Capaian cakupan ketersediaan energi listrik di Kotamobagu tahun 2017 sebersar 36% dengan jumlah konsumen atau pelanggan 43.993 jiwa. Dan jumlah daya yang terpasang sebesar 56.122.750 KVA, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi listrik belum merata. Adapun yang belum terlayani sebesar 64 % dari keseluruhan penduduk di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi 54% yang menjawab kurang setuju dan 33% menjawab setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi reponden terhadap kriteria ketersediaan energi listrik belum baik.karena masih sering terjadi pemadaman.

22. Ketersediaan Lapangan Kerja

Ketersediaan lapangan kerja ini dilakukan dengan mengetahui banyaknya tingkat penganguran dan ketersediaan lapangan kerja.

Ketersediaan tempat kerja di kota kotamobagu tahun 2017 masih di katakan sedikit yaitu 250 lapangan kerja. Hal ini berbanding terbalik dengan angka penganguran tahun 2017 yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah 5.632

jiwa.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi 53% yang menjawab kurang setuju dan 14% menjawab setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria ketersediaan lapangan kerja masih kurang sehingga masih tingginya angka pengangguran.

23. Kualitas Fasilitas Pejalan Kaki

Fasilitas jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mengetahui kondisi pedestrian di pusat kota seperti jalan Gatoto Subroto, jalan Adam Pedolot, jalan Ahmad Yani, jalan S. Parman, jalan Sutoyo, Jalan Soeparto, Jalan Krtini, dan jalan Ibolian.

Berdasarkan hasil analisis tidak semua jalan alteri dan kolektor memiliki pedestrian, namun dari segi kondisi ada 3 pedestrian yang di kategorikan baik yaitu jalan Adam Pedolot, jalan Ahmad Yani, dan jalan S.Parman. dan kondisi rusak ada 2 pedestrian yaitu jalan Gatot Subroto dan jalan Kartini. Adapun yang tidak ada pedestrian yaitu jalan Ibolian, jalan Sutoyo dan jalan Soeparto.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai persentase tertinggi 40% yang menjawab tidak setuju dan 23% menjawab kurang setuju, hal ini dapat menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kualitas fasilitas pejalan kaki belum cukup baik dan nyaman.

24. Ketersediaan Fasilitas Kaum Difabel

Fasilitas kaum difabel dilakukan dengan mengetahui jumlah fasilitas umum yang tersedia. Fasilitas kaum difabel kota Kotamobagu bisa dibilang sangat sedikit karena belum adanya perencanaan khusus tentang kebutuhan sirkulasi gerak, sarana, pra sarana fasilitas kaum difabel. Adanya fasilitas untuk kaum difabel yaitu sekolah luar biasa (SLB) 1 dan Panti Asuhan 3.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai presentase tertinggi 56% yang menjawab kurang setuju dan 25% menjawab tidak setuju, hal ini dapat

menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria ketresediaan fasilitas kaum difabel belum baik dan masih kurang untuk kaum difabel.

25. Kualitas Penataan Kota

Proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini, di samping telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang, tidak dapat dipungkiri masih menyisakan permasalahan yang bersifat konta-produktif dalam upaya perwujudan ruang kehidupan yang nyaman berkelanjutan dan sejahterah. Berikut berbagai isu strategis yang di hadapi saat ini antara lain adalah:

- a) Alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
- b) Semakin meningkatnya intensitas dan cakupan bencana alam.
- c) Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan, serta transportasi publik yang belum memadai.
- d) Semakin meningkatnya intensitas kemacetan lalu lintas dikawasan perkotaan, penyebabnya karena kurang tersedianya lahan parkir di area pusat-pusat perbelanjaan dan tidak terdapatnya jalur-jaulu pedestrian bagi pejalan kaki.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai tertinggi 56% yang menjawab kurang setuju dan 21% menjawab tidak setuju, hal ini menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap kriteria kualitas penataan kota belum baik, seperti ahli fungsi lahan yang semakin besar, meningkatnya intensitas kemacetan lalulintas di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas penataan kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dengan menggunakan 25 kriteria yang telah ditetapkan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) yang telah di kaji bahwa kota Kotamobagu menuju kota layak huni masih jauh dari

kata nyaman hal ini diketahui bahwa dari 25 kriteria yang di kaji terdapat 10 kriteria di nyatakan nyaman atau layak yang sejauh ini kesesuaian antara konsep *Livable City* dengan kondisi di lapangan memiliki kesesuaian yang baik untuk mendukung kota layak huni yaitu: Informasi pelayanan publik, Interaksi antar hubungan penduduk, Tingkat kriminalitas, Kualitas jaringan telekomunikasi, Kualitas fasilitas air bersih, Kualitas fasilitas pendidikan, Kondisi jalan, Ketersediaan angkutan umum, Kualitas kebersihan lingkungan, Jumlah ruang terbuka dan 15 kriteria tidak nyaman atau layak, sejauh ini kesesuaian antara konsep *livable city* dengan kondisi di lapangan memiliki kesesuaian yang kurang mendukung kondisi kota layak huni kota Kotamobagu yaitu: Tingkat aksesibilitas tempat kerja, Ketersediaan fasilitas air bersih, Ketersediaan fasilitas pendidikan, Kualitas fasilitas kesehatan, Ketersediaan fasilitas kesehatan, Kualitas angkutan umum, Tingkat pencemaran lingkungan, Perlindungan kawasan bersejarah, Kualitas fasilitas rekreasi, Ketersediaan fasilitas rekreasi, Ketersediaan energi listrik, Ketersediaan lapangan kerja, Kualitas fasilitas pejalan kaki, Ketersediaan fasilitas kaum difabel, Kualitas penataan kota

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. *SK Mendagri No. 65 tahun 1995.*
- Anonimous. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034*
- Anonimous. 2001. *PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.*
- Anonimous. 2009. *UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*
- Anonimous. *Badan Pusat Statistik* Kota Kotamobagu Dalam Angka 2017
- Astuti, Winny. 2017 *Kesesuaian Fungsi Taman Kota Dalam Mendukung Konsep Kota Layak Huni Di surakarta. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas 11 Maret*
- Bintarto. 1987. *Pola Kota dan Permasalahannya Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.*
- Darise, Djunaidi Irwinsyah. 2015. *Kajian Kota Manado Sebagai Kota Layak Huni Berdasarkan Kriteria (IAP) Ikatan Ahli Perencanaan. Skripsi. Manado : Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi.*
- Douglass, Mike. 2002. *From global intercity competition to cooperation for livable cities and economic resilience in Pacific Asia. Environment and Urbanization*
- Gosal Pierre H., Rondonuwu V. 2012, *Arsitektur Tropis Lembab, Jurnal Media Matrasain, Volume 8 Nomor 2, h. 131-141*
- Hahlweg, D. 1997. "The City as a Family" In Lennard, S. H., S von Ungern Sternberg, H. L. Lennard, eds. *Making Cities Livable. International Making Cities Livable Conferences. California, USA: Gondolier Press.*
- Heryanto. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kota Medan Sebagai Kota Layak Huni. Skripsi. Medan : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatra Utara Medan 2017*
- Karningsih. 2012. *ANALISIS PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI KOTA SEMARANG. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Serat Acitya– Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*
- Monoarfa, Richard Vennesanki. 2016. *Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mewujudkan Kota Hijau (P2KH). Skripsi. Manado: Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi.*
- Marbun, B.N. 1994. *Kota Indonesia*

- Masa Depan: Masalah dan
Prospek. Jakarta: Erlangga*
- Putro, Bernardus Djono, at.all,
Indonesia Most Livable City
Index, ttp, 2009*
- Prasetyo dan Muttaqin. 2009. Ikatan
Ahli Perencana Indonesia. Masa
Depan Kota Metropolitan di
Indonesia. Symposium Nasional
Balitbang Indonesia Most Livable
City Index. Indonesia*
- Setiawan, Aris. Muhammad.2015.
Konsep Kota Layak Huni (Livable
City) Dalam Qur'An. Jurnal
Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Walisongo
Semarang.*